

# Menjaga Pemilu, Menjaga Negara

Oleh Muhammad Rofiuddin



**BANGSA** Indonesia akan mengaruhi dua momentum politik besar, yaitu Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Keriuhan diprediksi akan terjadi di arena perebutan kekuasaan lima tahunan itu. Para politikus akan melakukan berbagai manuver untuk memperebutkan jabatan, baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Sah-sah saja, karena pilkada/pemilu adalah penentuan kepemimpinan di pemerintahan secara reguler yang sesuai dengan aturan.

Bagi rakyat, pemilu adalah ruang partisipasi sekaligus momentum untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan politik dan pemerintahan. Pemilu dan pilkada langsung bisa memperbesar harapan rakyat untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan kuat legitimasinya.

Namun pemilu/pilkada yang sudah menyedot anggaran besar belum tentu bisa menuai panen ideal seperti yang diharapkan. Masih banyak kendala yang berpotensi menyumbat harapan ideal itu.

Dari sisi regulasi, banyak aturan pemilu yang belum tersosialisasikan dengan baik. Salah satu karakteristik regulasi pemilu itu bisa berubah setiap kali pemilu.

Belum lagi regulasi itu terkadang juga kurang jelas, tidak tegas hingga mengandung banyak celah. Sudah begitu, cara berpolitik di Indonesia masih diselimuti siasat dengan cara memanfaatkan celah tersebut. Akibatnya, potensi terjadinya pelanggaran pemilu masih selalu terbuka lebar.

Sementara itu, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih dilingkupi berbagai keterbatasan. Dari sisi jumlah personel, jajaran pengawas pemilu terbilang minim jika dibandingkan dengan luasan wilayah dan kompleksitas potensi kerawanan pelanggaran pemilu. Sesuai dengan karakteristiknya, pelanggaran pemilu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Ruang lingkup pelanggaran pemilu juga sangat luas. Bisa terjadi di lorong-lorong gelap yang tak bisa terjangkau mata dan telinga jajaran Bawaslu. Pelakunya juga bisa siapa saja, dari masyarakat biasa hingga elite politik.

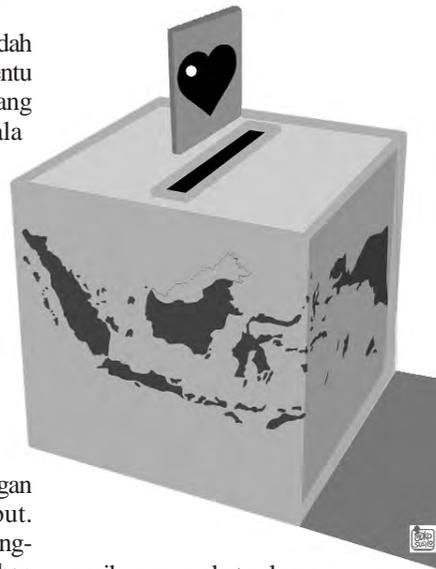
Rasa-rasanya pengawas pemilu tak

akan mampu memelototi detik per detik semua peristiwa kontestasi di seluruh wilayah. Belum lagi jika pelanggaran pemilu itu terjadi di ruang-ruang privat yang tak terpantau setiap saat.

## Keterlibatan Masyarakat

Dalam situasi seperti itulah kehadiran masyarakat untuk ikut mengawal pemilu/pilkada menemukan relevansinya. Tak hanya untuk membantu Bawaslu, tapi juga untuk kepentingan masyarakat sendiri. Keterlibatan masyarakat itu untuk memastikan keterlindungan hak politik warga.

Adanya keterlibatan masyarakat juga sebagai ikhtiar mewujudkan pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas. Masyarakat harus menyadari bahwa pemilu tidaklah hanya lima menit di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilu adalah momentum lima tahun sekali sehingga akan menentukan



nasib masyarakat selama lima tahun ke depan.

Dari sisi peserta pemilu, keterlibatan masyarakat bertujuan agar para peserta selalu takut dan berhitung seribu kali jika ingin melakukan pelanggaran. Sebab, saat akan melakukan pelanggaran mereka berpikir akan diketahui masyarakat sehingga batal melakukannya.

Pengawasan dari masyarakat juga membuat penyelenggara pemilu akan merasa selalu dikontrol sehingga mereka akan selalu berusaha bekerja baik, independen, dan profesional. Jika peserta dan penyelenggara pemilu merasa tidak diawasi maka mereka akan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk melakukan pelanggaran.

Padahal, hampir semua tahapan pemilu selalu ada potensi pelanggarannya. Dari tahapan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, masa kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara hingga rekapitulasi suara. Masyarakat bisa melakukan banyak hal untuk berperan menjaga pemilu. Dari yang ringan hingga yang berat. Misalnya, kita bisa ikut melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan pemilu sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang termasuk pelanggaran/kecurangan pemilu.

Masyarakat juga bisa ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sesuai dengan peran sosial masing-masing. Misalnya, jika ada peserta pemilu yang memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah ataupun lembaga pendidikan maka warga sekitar harus ramai-ramai mencegahnya.

Jika di lingkungan rumah kita ada orang yang membagi-bagikan uang untuk kemenangan pasangan calon kepala daerah, kita harus menolak dan mencegahnya.

Harus diakui, hingga kini belum banyak masyarakat yang bersedia ikut membongkar dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Salah satu penyebabnya, mereka khawatir dilaporkan balik oleh terlapor, terutama dengan pasal pencemaran nama baik.

Ini seperti yang menimpa aktivis Komite Pencegahan dan Penyelidikan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto. Saat Ronny melaporkan Fadli Zon ke Panwaslu karena diduga melakukan politik uang pada Pilpres 2014, Fadli Zon justru melaporkan Ronny kepada polisi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

Agar apa yang menimpa Ronny tidak terjadi pada yang lain maka Bawaslu harus memastikan perlindungan kepada para pelapor dugaan pelanggaran pemilu agar masyarakat merasa nyaman dan tidak mendapatkan ancaman saat ikut menjaga pemilu.

Terakhir, untuk mendorong pemilu yang jujur dan demokratis, tak ada jalan lain kecuali masyarakat mau terlibat menjaga pemilu. (49)

—**Muhammad Rofiuddin**, mantan Tim Seleksi Panwas Kabupaten/Kota Se-Jateng 2016 dan 2017, dosen tamu di Jurusan Komunikasi FISIP Undip.